

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI KOTA BATAM**

Dewi Anita¹, Dian Efriyenti²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam
email: pb220810015@upbatam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Local Own-Source Revenue (PAD), Balancing Funds, and Capital Expenditure on the financial performance of the Batam City Government. This research is motivated by fluctuations in PAD and Balancing Funds, as well as a decline in the proportion of Capital Expenditure during the 2017–2024 period, which indicates the need for an evaluation of regional fiscal performance. The study employs a quantitative approach using secondary data obtained from the Budget Realization Reports of the Batam City Government. Data were analyzed using multiple linear regression supported by classical assumption tests, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination (R^2). The results show that PAD and Capital Expenditure have a positive and significant effect on regional financial performance, while Balancing Funds have a negative and significant effect, indicating a high level of dependence on central government transfers. Simultaneously, PAD, Balancing Funds, and Capital Expenditure significantly affect the financial performance of the Batam City Government.

Keywords: *Balancing Funds; Capital Expenditure; Local Government Financial Performance; Local Own-Source Revenue*

PENDAHULUAN

Perkembangan otonomi daerah di Indonesia lahir sebagai konsekuensi dari era reformasi yang menuntut terjadinya perubahan mendasar dalam tata kelola dan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi tersebut menggeser pola pengelolaan negara dari sistem yang sangat terpusat menuju mekanisme desentralisasi. Melalui desentralisasi, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperbaiki kualitas layanan publik, memperkuat kapasitas dan kemandirian daerah, serta membuka ruang bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pembangunan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam pelaksanaan dan pengelolaan urusan pemerintahan, dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, serta karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut selanjutnya diperkuat melalui pengaturan mengenai desentralisasi fiskal di Indonesia yang diimplementasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Landasan hukum ini menegaskan bahwa desentralisasi tidak terbatas

pada urusan administrasi pemerintahan, melainkan juga meluas pada pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah sebagai elemen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia pada dasarnya menggambarkan bahwa praktik pengelolaan keuangan publik masih membutuhkan perbaikan yang konsisten dan berkelanjutan. Berbagai persoalan, seperti kurang efektifnya penggunaan anggaran, lemahnya sistem pengendalian internal, serta belum maksimalnya capaian pendapatan dan penyerapan belanja, menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal daerah belum berjalan optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta penerapan anggaran berbasis kinerja menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya manajemen keuangan daerah yang lebih efisien dan mampu mendukung keberhasilan pembangunan regional secara berkesinambungan.

Pengelolaan keuangan daerah memegang peranan strategis dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, karena melalui manajemen fiskal yang baik dapat terlihat kemampuan pemerintah daerah dalam

merencanakan dan mengalokasikan pendapatan serta belanja secara tepat. Pada praktiknya, laporan keuangan daerah menjadi instrumen penting untuk menunjukkan bentuk pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas pengelolaan anggaran. Baik eksekutif maupun legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan tersebut menyajikan informasi keuangan, perencanaan, dan penganggaran secara lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana ditegaskan oleh (Alim & Djasuli, 2024:790).

Secara konseptual, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan yang dimilikinya guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi terhadap kinerja ini dapat dilakukan dengan menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengembangkan potensi keuangan yang dimiliki wilayahnya. Hasil pengukuran tersebut tidak hanya menunjukkan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan, tetapi juga berperan sebagai acuan perbaikan terhadap pencapaian pada periode berikutnya. Selaras dengan perspektif teori agensi, pemerintah daerah sebagai pihak yang memperoleh amanah dan kepercayaan dari masyarakat berkewajiban menyajikan laporan dan evaluasi kinerja keuangan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban publik (Panggeso et al., 2024:979).

Stabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki oleh suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahannya secara mandiri. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen kunci karena bersumber dari aktivitas ekonomi lokal, seperti pajak daerah dan retribusi, yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah tersebut. Besarnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sering dijadikan indikator utama tingkat kemandirian fiskal. Semakin tinggi proporsi PAD, semakin rendah tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana yang bersumber dari pemerintah pusat.

Selain PAD, sejumlah faktor lain juga berkontribusi terhadap pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD), khususnya Dana Perimbangan dan Belanja Modal. Dana Perimbangan sebagai transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, terutama bagi wilayah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas. Walaupun kemandirian daerah idealnya bertumpu pada PAD, keberadaan dana ini tetap diperlukan untuk

menjaga kesinambungan pembangunan serta mengurangi disparitas fiskal antardaerah. Pemanfaatan Dana Perimbangan yang efektif akan membantu menjaga stabilitas pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan belanja. Di sisi lain, belanja modal mempresentasikan penanaman investasi jangka panjang yang diwujudkan melalui pengadaan dan pembangunan asset tetap, seperti infrastruktur dan sarana pelayanan publik. Pengalokasian belanja modal yang tepat tidak semata-mata berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik di masa depan, sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap KKPD.

Penelitian yang dilakukan oleh (Atmoko & Khairudin, 2022:291) terhadap pemerintah daerah di Provinsi Lampung selama periode 2017–2019 menunjukkan bahwa rata-rata kinerja keuangan daerah, yang diukur melalui rasio efisiensi keuangan daerah (REKD), mencapai 100,8%. Nilai tersebut mencerminkan bahwa proses pemungutan pendapatan belum berjalan efisien. Ketidakefisienan ini muncul bersamaan dengan rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang hanya sekitar 8,1%, yang mengindikasikan bahwa kapasitas pemungutan masih belum berjalan secara maksimal serta tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih relatif rendah, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat tetap tinggi. Meski demikian, temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD tetap memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sehingga peningkatan PAD berpotensi memperbaiki capaian kinerja fiskal daerah. Selain itu, aspek yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut adalah bagaimana belanja modal direalisasikan dan dikelola, mengingat komponen ini memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas pembangunan daerah.

Meskipun belanja modal seharusnya berfungsi sebagai investasi jangka panjang yang menghasilkan aset tetap seperti infrastruktur, rata-rata alokasinya yang hanya sekitar 21,2% justru tidak memperlihatkan adanya pengaruh yang berarti terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.. Temuan tersebut memunculkan pertanyaan penting mengenai efektivitas pengalokasian anggaran, terutama karena temuan penelitian ini tidak sejalan dengan hasil sejumlah hasil penelitian sebelumnya yang mengemukakan temuan serupa bahwa belanja modal memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja fiskal. Ketidakkonsistenan ini menegaskan perlunya pengkajian ulang, khususnya pada daerah dengan kondisi dan karakteristik fiskal yang berbeda. Dalam perspektif lain, Joni Fernandes (2021)

menjelaskan bahwa keberadaan infrastruktur yang baik serta peningkatan investasi diharapkan dapat memperbesar PAD dan mendorong peningkatan dana perimbangan, yang pada akhirnya memungkinkan daerah mengalokasikan belanja modal secara lebih optimal.

Kota Batam merupakan wilayah terbesar di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki posisi geografis memiliki posisi yang memiliki posisi yang sangat penting karena berada di lintasan perdagangan internasional di perairan Selat Malaka. Lokasinya yang hanya sekitar 20 kilometer dari Singapura dan berdekatan dengan Malaysia menjadikan kota ini sebagai pintu masuk penting bagi Indonesia dalam kegiatan industri, perdagangan, dan investasi asing. Secara administratif, Batam mencakup wilayah daratan seluas kurang lebih 1.035 km² dan kawasan perairan sekitar 2.000 km², yang terbagi ke dalam 12 kecamatan dan lebih dari 60 kelurahan. Posisinya sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) turut memacu perkembangan sektor industri, perkapalan, elektronik, minyak dan gas, logistik, serta pariwisata (Fatimah et al., 2022:7).

Aktivitas ekonomi tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Batam tumbuh menjadi salah satu pusat ekonomi paling dinamis di bagian barat Indonesia. Pertumbuhan yang pesat ini juga mendorong tingginya arus urbanisasi dan mobilitas tenaga kerja, sehingga jumlah penduduk Batam terus meningkat dan dalam beberapa tahun terakhir diperkirakan telah melampaui sekitar 1,2 juta penduduk menurut data dari Badan Pusat Statistik.

Keterkaitan antara fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peran Dana Perimbangan sebagai penopang fiskal, serta menurunnya proporsi Belanja Modal menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya PAD semata (Haptari et al., 2022:789). Kemandirian tersebut lebih jauh mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi dan mengelola anggaran secara efektif, termasuk bagaimana daerah memprioritaskan penggunaan sumber daya fiskalnya agar dapat mencapai tujuan pembangunan secara efisien.

Penelitian (Mubarok et al., 2022:503) mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, Dana Perimbangan justru memberikan pengaruh negatif meskipun tetap signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketergantungan yang terlalu tinggi pada Dana Perimbangan dapat menurunkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Yuliawati et al., 2024:13)

terhadap Penelitian pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara keseluruhan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Perbedaan temuan antarpelitian ini mencerminkan adanya variasi dalam karakteristik fiskal serta kemampuan pengelolaan keuangan di masing-masing wilayah yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Batam. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kinerja keuangannya.

KAJIAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah merupakan hak dan kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan serta memenuhi kepentingan masyarakat sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip desentralisasi, yaitu penyerahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pemberdayaan, dan keterlibatan aktif masyarakat (Ronald L. Holzhacker, Rafael Wittek, 2020:122). Desentralisasi tidak hanya mencakup aspek politik dan administrasi, tetapi juga aspek keuangan melalui desentralisasi fiskal, yang memberi pemerintah daerah keleluasaan dalam mengelola dan membelanjakan anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, meskipun sebagian besar sumber penerimaan masih berada di bawah kendali pemerintah pusat (Puspita & Hamidi, 2021:7).

2.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan menjadi dasar penting dalam akuntansi sektor publik karena menjelaskan interaksi antara masyarakat sebagai prinsipal dengan pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Batam, sebagai agen yang dipercayakan untuk mengelola anggaran serta sumber daya publik secara transparan dan akuntabel (Hoesada, 2019:133). Ketidakseimbangan informasi serta perbedaan tujuan antara kedua pihak berpotensi menimbulkan konflik keagenan, sehingga kinerja keuangan daerah (KKD) berperan sebagai mekanisme pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran. Dalam perspektif teori ini, variabel-variabel seperti PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal merepresentasikan kewajiban pemerintah

daerah dalam melaksanakan amanah sebagai agen sesuai dengan prinsip kontrak keagenan (Devella & Abdullah, 2021:722).

2.3 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori Sinyal (*Signalling Theory*) menguraikan bagaimana pihak yang memiliki informasi lebih lengkap, yakni pemerintah daerah sebagai agen, menyampaikan sinyal kepada masyarakat sebagai prinsipal untuk meminimalkan ketidakseimbangan informasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, sinyal tersebut disampaikan melalui publikasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyajikan pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai indikator kualitas tata kelola dan akuntabilitas fiskal. Capaian kinerja yang baik, terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dipersepsikan sebagai sinyal positif keberhasilan pengelolaan keuangan dan dapat memengaruhi penilaian publik dalam pengambilan keputusan politik maupun ekonomi. Selain itu, belanja modal juga berfungsi sebagai sinyal strategis karena mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dan investasi jangka panjang (Supriono et al., 2023:83).

2.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal, karena pengukurannya tidak didasarkan pada laba tetapi pada kemampuan pemerintah mengatur dan memanfaatkan sumber daya keuangan dengan cara yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mencapai tujuan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut (Ardelia et al., 2022:61) kinerja keuangan berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait pemanfaatan PAD dan dana transfer pemerintah pusat dalam pendanaan berbagai belanja daerah, termasuk belanja modal yang memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Penilaian kinerja keuangan daerah juga harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan, sehingga tidak hanya melihat realisasi anggaran, tetapi juga bagaimana pendapatan dan belanja dikelola secara optimal dan transparan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Muhammad, 2022:72).

2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan utama yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, karena diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memanfaatkan potensi serta kewenangan yang dimiliki daerah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti laba BUMD, serta jenis pendapatan asli daerah sah lainnya (Andriyani et al., 2025:148).

2.6 Dana Perimbangan (X2)

Dana Perimbangan adalah salah satu komponen utama pendapatan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal, berupa transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi kesenjangan pendanaan antara pusat dan daerah (vertical imbalance) ditambah dengan perbedaan kapasitas fiskal masing-masing daerah (horizontal imbalance), sehingga turut menunjang pelaksanaan desentralisasi dan penyediaan layanan publik secara merata (Widiastuty, 2022:1).

2.7 Belanja Modal (X3)

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah, baik APBN maupun APBD, yang bersifat investasi jangka panjang untuk pengadaan aset berwujud atau aset lain yang memiliki masa beberapa manfaat tahun anggaran. Berbeda dengan belanja operasional, aset dari belanja modal digunakan secara berkelanjutan untuk mendukung fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, serta menambah kekayaan dan nilai aset pemerintah sesuai ketentuan regulasi teknis di Indonesia (Nurhayati, 2023:21).

2.8 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian (Mubarak et al., 2022:503) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal cenderung memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan Pendapatan Antarpemerintahan yang berasal dari transfer pemerintah pusat memiliki pengaruh positif. Temuan tersebut selaras dengan (Mulia & Widiatmoko, 2025:2142 yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan daerah, sementara Belanja Modal memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan, sehingga menekankan pentingnya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan belanja.

2.9 Hipotesis Penelitian

- 1 H¹ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Batam.
- 2 H² Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Batam.
- 3 H³ Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Batam.
- 4 H⁴ Pengaruh Pendapatan Asli

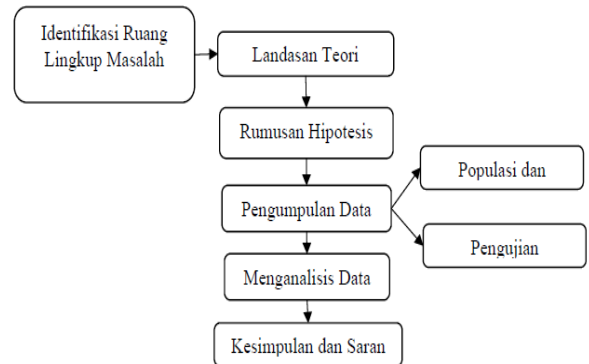
Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Batam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif yang bertujuan menguji hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam. Data penelitian bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Batam yang telah diaudit untuk periode 2017–2024 dan diperoleh melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. Kinerja keuangan pemerintah daerah diposisikan sebagai variabel terikat, sedangkan PAD, Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal sebagai variabel bebas yang diukur berdasarkan realisasi anggaran dalam LRA.

Populasi penelitian mencakup seluruh Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Batam selama periode pengamatan, dengan teknik penentuan sampel menggunakan metode sensus sehingga seluruh data populasi dijadikan unit analisis. Untuk menyesuaikan kebutuhan analisis runtut waktu, data tahunan ditransformasikan menjadi data triwulanan melalui proses interpolasi menggunakan perangkat lunak EViews, sehingga menghasilkan 32 observasi penelitian. Akuisisi data dilakukan lewat metode catatan resmi, sementara analisis data meliputi penyajian ringkasan data, pengujian asumsi klasik, serta estimasi model regresi linier berganda guna menguji hipotesis penelitian secara empiris. kebutuhan analisis deret waktu dan menambah jumlah observasi, data tahunan dikonversi

menjadi data triwulanan melalui interpolasi menggunakan EViews, sehingga delapan tahun data menghasilkan 32 observasi triwulanan. Transformasi ini mempertahankan karakter utama masing-masing variabel sehingga data tetap layak digunakan untuk pengujian regresi dan diharapkan merefleksikan



Gambar 1. Desain Penelitian
(Sumber : Data Penelitian, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan data dokumenter dianalisis secara kuantitatif, Laporan Keuangan hasil audit BPKAD Kota Batam digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. untuk periode 2017–2024. Populasi penelitian meliputi seluruh pemerintah daerah di Kota Batam, sedangkan sampel diambil dari Laporan Realisasi Anggaran pada periode tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penilaian kinerja keuangan daerah secara sistematis berdasarkan data yang telah tervalidasi.

1. Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	32	230,57	464,22	307,9868	68,14997
DP	32	223,30	420,24	280,0200	52,15729
BM	32	71,64	189,23	143,1151	28,98387
KK	32	22,30	31,20	27,4531	2,82466
Valid N (listwise)	32				

(Sumber : Data Penelitian, 2025)

1. Pendapatan Asli Daerah Batam berkisar Rp 230,57–464,22 miliar, dengan rata-rata Rp 307,98 miliar dan deviasi standar Rp 68,15 miliar.
2. Dana Perimbangan Batam berkisar Rp 223,30–420,24 miliar, dengan rata-rata Rp 280,02 miliar dan deviasi standar Rp 52,16 miliar.
3. Belanja modal Batam berkisar Rp 71,64–189,23 miliar, dengan rata-rata Rp 143,12 miliar dan deviasi standar Rp 28,98 miliar.
4. Kinerja keuangan Batam berkisar 22,30%–31,20%, dengan rata-rata 27,45% dan deviasi standar 2,82%.

2. Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	,28207524	
Most Extreme Differences	Absolute	,110	
	Positive	,076	
	Negative	-,110	
Test Statistic			,110
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	,403	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,390
		Upper Bound	,415

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1314643744.

(Sumber : Data Penelitian, 2025)

Hasil uji normalitas memperlihatkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang lebih tinggi dari 0,05, sehingga dapat

disimpulkan bahwa residual penelitian terdistribusi normal.

3. Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieitas

Coefficients ^a			
			Collinearity Statistics
			VIF
Model	Tolerance		
1	PAD	,146	6,846
	DP	,166	6,022
	BM	,722	1,385

a. Dependent Variable: KK

(Sumber : Data Penelitian, 2025)

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF untuk variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Belanja Modal (BM) semuanya berada di bawah 10, dengan nilai

toleransi masing-masing tidak kurang dari 0,1. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen tersebut bebas dari masalah multikolinieritas.

4. Uji Heteoskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteoskedastisitas

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	,009	,002		4,837
	PAD	-,142	,159	-,201	-,895
	DP	-,055	,112	-,098	-,493
	BM	,021	,030	,160	,708

a. Dependent Variable: res2

(Sumber : Data Penelitian, 2025)

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,

dan Belanja Modal semuanya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian memenuhi asumsi homoskedastisitas

dan bebas dari masalah heteroskedastisitas.

5. Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^a			
Model		Durbin-Watson	
1			2,170 ^a
a. Predictors: (Constant), BM	DP	PAD	
b. Dependent Variable: KK			

(Sumber : Data Penelitian, 2025)

Nilai Durbin-Watson (DW) yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 2,170. Nilai tersebut dibandingkan dengan batas atas (DU) dari tabel Durbin-Watson sebesar 1,651. Dengan demikian, diperoleh perbandingan $1,651 < 2,170 < 2,349$ ($4 - 1,651$). Berdasarkan kriteria ini, nilai DW berada di antara DU dan 4–

DU, yang menunjukkan bahwa residual model regresi tidak memiliki pola korelasi serial. Dengan kata lain, data penelitian tidak mengalami masalah autokorelasi, sehingga asumsi klasik regresi terpenuhi dan hasil analisis regresi dapat dipercaya.

6. Regresi Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant) 27,938	,394		70,875	<,001
	PAD ,090	,002	2,175	44,051	<,001
	DP -,104	,003	-1,927	-41,599	<,001
	BM ,007	,002	,069	3,112	,004

a. Dependent Variable: KK

(Sumber : Data Penelitian, 2025)

- Konstanta sebesar 27,938 mengindikasikan bahwa apabila variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal bernilai nol atau tidak mengalami perubahan, maka kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam pada periode 2017–2024 diperkirakan tetap berada pada angka 27,938.
- Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,090 menunjukkan hubungan positif dengan kinerja keuangan. Artinya, jika PAD meningkat sebesar 1% dengan variabel independen lainnya tetap, kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam pada periode 2017–2024 diperkirakan akan meningkat sebesar 9%.
- Koefisien regresi variabel Dana Perimbangan (DP) sebesar -0,104 menunjukkan hubungan negatif dengan kinerja keuangan. Artinya, jika DP menurun sebesar 1% dengan variabel independen lainnya tetap, kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam pada periode 2017–2024 diperkirakan akan meningkat sebesar 10,4%.
- Koefisien regresi variabel Belanja Modal (BM) sebesar 0,007 menunjukkan hubungan positif dengan kinerja keuangan. Artinya, jika BM meningkat sebesar 1% dengan variabel independen lainnya tetap, kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam pada periode 2017–2024 diperkirakan akan meningkat sebesar 0,7%.

7. Uji T Parsial

Tabel 7. Hasil Uji T Parsial

Coefficients ^a	
---------------------------	--

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	27,938	,394		70,875	<,001
1 PAD	,090	,002	2,175	44,051	<,001
DP	-,104	,003	-1,927	-41,599	<,001
BM	,007	,002	,069	3,112	,004

a. Dependent Variable: KK

(Sumber : Data Penelitian, 2025)

Berdasarkan hasil tersebut:

- Hasil uji t memperlihatkan bahwa nilai signifikat variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 0.001, yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, dan nilai t hitung sebesar 44,051 lebih tinggi dibandingkan t tabel 2,048. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Koefisien regresi sebesar 0,090 menegaskan arah pengaruh positif, sehingga setiap peningkatan PAD berdampak positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam pada periode 2017–2024. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Dana Perimbangan (DP) sebesar 0,000, lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, dengan t hitung -41,599 yang lebih besar daripada t tabel -2,048. Hal ini mengindikasikan bahwa DP memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dengan koefisien regresi -0,104 yang menunjukkan arah pengaruh negatif.
- Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Belanja Modal (BM) sebesar 0,004, lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, dan t hitung 3,112 lebih besar daripada t tabel 2,048. Hal ini menunjukkan bahwa BM memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dengan koefisien regresi 0,007 yang menegaskan arah pengaruh positif. Artinya, setiap peningkatan BM memberikan dampak positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam pada periode 2017–2024. Berdasarkan temuan ini, hipotesis ketiga penelitian diterima.

8. Uji F Simultan

Tabel 8. Hasil Uji F Simultan

ANOVA						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	244,873	3	81,624	926,587	<,001b
	Residual	2,467	28	,088		
	Total	247,340	31			

a. Dependent Variable: KK

b. Predictors: (Constant), BM, DP, PAD

(Sumber : Data Penelitian, 2025)

Pada tingkat signifikansi 0,05 dan derajat bebas (df) sebesar $df = n - k - 1 = 32 - 3 - 1 = 28$, diperoleh nilai F tabel 2,95. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi F-statistic adalah 0,001, lebih kecil dari 0,05, dan F hitung 926,587 lebih besar dari F tabel 2,95. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam pada periode 2017–2024. Dengan demikian, hipotesis keempat penelitian diterima.

9. Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,995a	,990	,989	,29680

a. Predictors: (Constant), BM, DP, PAD

b. Dependent Variable: KK

(Sumber : Data Penelitian, 2025)

Nilai koefisien determinasi Adjusted R^2 sebesar 0,989 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal memiliki pengaruh sangat kuat terhadap kinerja keuangan Pemerintah

Kota Batam pada periode 2017–2024, dengan kontribusi sebesar 98,9%. Sisanya, sebesar 1,1%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

SIMPULAN

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal (BM) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam, sedangkan Dana Perimbangan (DP) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan selama periode 2017–2024.
2. Berdasarkan uji simultan (uji F), Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja

keuangan Pemerintah Kota Batam.

3. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan, yang mencerminkan masih adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, R. Z., & Djasuli, M. (2024). Optimization Of Regional Financial Management For Sustainable Development. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(2), 789–793. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i2.2699>
- Andriyani, T., Dilla, D. R., & Prayoga, R. O. (2025). Kemandirian Keuangan Daerah: Studi Kasus Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023. *Srodja*, 11(1), 1–5. <https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/srodja/article/view/54%0Ahttps://ejournal.umsj.ac.id/index.php/srodja/article/download/54/52>
- Atmoko, C. A., & Khairudin, K. (2022). Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 291–296. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1295>
- Devella, F. N., & Abdullah, S. (2021). Memahami Hubungan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah dari Perspektif Hubungan Keagenan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 1(1), 67. <https://doi.org/10.35308/jimetera.v1i1.4327>
- Fatimah, Z., Simamora, B. P., & Silitonga, F. (2022). Pemberlakuan Ftz Di Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Batam Dalam Peningkatan Pariwisata. *Jurnal Mekar*, 1(1), 7–13. <https://doi.org/10.59193/jmr.v1i1.16>
- Haptari, V. D., Ginting, A. M., & Aritonang, F. D. (2022). Analysis of Factors Affecting Regional Financial Independence in the Framework of a Policy Strategy For Increasing Regional Original Income. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 2(4), 777–796. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i4.412>
- Hoesada, D. J. (2019). *Teori Keagenan*.
- Mubarok, M. H., Nasution, A. A., Kesuma, S. A., & Pangestu, W. (2022). Local government financial performance: the effects of capital expenditure and intergovernmental revenue (The case of South Sumatra Province, Indonesia). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(6), 503–512. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.11364>
- Muhammad, D. I. P. (2022). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Nurhayati, S. (2023). *Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Barat Tahun 2017-2021)*. 16–52.
- Panggeso, A. G., Nirwana, & Haliah. (2024). Transparency and Accountability in Public Financial Reporting: Implementation and Challenges in the Digital Era: A Systematic Literature Review. *International Journal of Business and Applied Economics*, 3(6), 979–990. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v3i6.11875>
- Puspita, D., & Hamidi, U. S. (2021). Desentralisasi Fiskal Dua Dekade Implementasi. *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–289.
- Ronald L. Holzhaecker, Rafael Wittek, J. W. (2020). *Decentralization and Governance in Indonesia* (Vol. 24, Issue November). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-22434-3>
- Widiastuty, T. (n.d.). *The Level of Regional Financial Independence as One of the Benchmarks for Government Performance in Indonesia*. 5(1).
- Yuliatwati, S., Zuliyana, M., & Sasiska, R. (2024). Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi daerah di Indonesia mulai berlaku sejak

diberlakukannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 01 Januari 2001 . Salah satu tujuan penerapan otonomi daer. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti*, 6(1), 13–29.